

Angkutan Umum, Berkelit di Masa Sulit

KEBIJAKAN Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar serta diikuti pula kenaikan harga BBM Pertamina, tidak hanya berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, tapi secara langsung berimbas terhadap angkutan umum. Bagaimana tidak, selain bahan bakar terutama Biosolar (untuk kendaraan angkutan umum besar seperti bus, truk, dan sejenisnya) yang menjadi 'darahnya' kendaraan diesel, kenaikan harga BBM tentu saja bakal berimbas terhadap biaya perawatan kendaraan, suku cadang, dan lain-lain. Para pengelola atau operator angkutan umum pun dituntut untuk pandai-pandai berkelit di masa sulit ini.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY V Hantoro menyatakan, ada tarif angkutan umum di DIY yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan ada pula yang ditentukan oleh masing-masing pengelola angkutan umum yakni angkutan umum milik swasta.

Untuk tarif Bus Trans Jogja yang merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemda DIY, diatur sepenuhnya oleh Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perhubungan DIY. Sementara Dishub DIY sejauh ini memastikan tidak akan menaikkan tarif Trans Jogja pascakenaikan harga BBM.

"Jika tarif Bus Trans Jogja tidak naik meski harga BBM naik, mungkin karena ada subsidi dari Pemda DIY. Kemungkinan pula Dishub akan mengubah jalur-jalur yang tidak efektif disubsidi ke jalur efektif," tuturnya.

"Kalau dari sudut pandang kami, dengan adanya kenaikan harga BBM maka menjadi hukum sebab akibat. Karena komponen BBM berkontribusi 40 persen pada perhitungan tarif. Tetapi apabila berkaitan dengan anggaran tidaklah mudah mengubahnya, apalagi sudah memasuki bulan-bulan menuju akhir tahun 2022. Yang jelas, meski tarif tidak berubah alias tetap, mudah-mudahan Trans Jogja masih bisa tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," jelasnya.

"Dari Dishub semuanya yang lebih tahu, lalu mengatur dan memutuskan perihal tarif Bus Trans Jogja. Kalau Organda hanya sebagai wadah saja. Berbeda dengan teman-teman di luar subsidi itu, kami secara otomatis melakukan penyesuaian tarif alias menaikkan tarif angkutan di kisaran

18-22 persen untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), serta 20 persen untuk bus pariwisata," tegas Hantoro.

Pemilik PO GeGe Transport ini mengungkapkan, persentase kenaikan tarif angkutan darat tersebut di DIY masih tetap memperhitungkan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum. Sementara itu, tarif taksi pun telah disesuaikan, dimana tarif perkilometranya telah diajukan permohonan penyesuaian harga dan menunggu persetujuan dengan SK Gubernur DIY.

"Tarif angkutan umum darat untuk bus yang diatur sebenarnya kelas ekonomi. Sedangkan tarif bus kelas eksekutif tergantung operator karena berkaitan dengan servis atau pelayanan. Tetapi perhitungan global pasti ada perhitungan tarif perkilometranya," imbuh Hantoro.

Kenaikan atau penyesuaian tarif angkutan darat ini berbeda-beda antara provinsi satu dengan lainnya di Indonesia. Sebab karakter daerahnya berbeda, khususnya bagi bus AKDP dan taksi, semisal tarifnya naik sedikit itu mungkin daerahnya tidak macet atau datar, sehingga untuk kebutuhan perawatan atau maintenance kendaraan lebih sedikit.

"Jadi tarif batas atas dan batas bawah angkutan umum darat sudah ada perhitungannya. Sama dengan bus pariwisata, dimungkinkan tarifnya di Yogyakarta, Semarang dan Surakarta itu hampir atau mendekati sama paling selisihnya tipis, padahal operatornya sendiri-sendiri," paparnya.

Penyesuaian tarif angkutan darat di luar subsidi alias selain Bus Trans Jogja tersebut di DIY telah diberlakukan sejak Senin, 5 September 2022.

DPD Organda DIY mencatat jumlah bus AKDP yang beroperasi sebanyak 50 armada, bus AKAP lebih dari 200 unit, bus pariwisata sekitar 800 armada dan taksi hanya tersisa 20 persen dari total 1.050 armada yang sebelumnya dipicu euforia angkutan berbasis aplikasi.

"Jika berbisnis angkutan umum sekali jalan dengan jarak lebih dari 100 km, kami sudah tidak mampu memberikan pelayanan sendiri tanpa ada subsidi dari Pemerintah. Karena kompetitor kami saat ini adalah angkutan pribadi baik motor maupun mobil, sedangkan dulu kompetisinya antar-PO," tandas Hantoro.

Terkait load factor angkutan



KR-Franz Boedisukamanto

Bus Trans Jogja diharapkan mampu menjadi angkutan umum pilihan masyarakat dalam menjawab semakin mahalnya harga BBM.

darat, Ketua DPD Organda DIY menyebut bus AKAP mencapai 60 persen pada weekdays dan 90 persen pada weekend, kemudian bus AKDP terjun bebas di bawah 5 persen. Sementara tingkat keterisian penumpang bus pariwisata mencapai 65 persen di hari biasa dan 99 persen pada akhir pekan.

"Organda DIY hanya mengharapkan adanya kepastian stok BBM pascakenaikan harga. Toh, kami tidak bisa memilih dan menawar. Jadi kalau BBM naik silakan naik, tetapi yang utama dipastikan stok BBM terjamin ada," tandas Hantoro.

Tarif Bus Trans Jogja dipastikan tidak ada kenaikan, meski terdampak kenaikan harga BBM. Sebagai gantinya, untuk menekan biaya pengeluaran, mereka akan mengurangi jam operasional.

"Saat ini tarif Trans Jogja tidak akan dinaikkan. Karena kondisi normal saja animo masyarakat untuk menggunakan Trans Jogja, belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Apalagi jika tarif dinaikkan. Untuk itu Trans Jogja punya opsi lain untuk menghindari peningkatan biaya operasional. Pembatasan jam operasi tidak ada, tetapi hanya ada pengaturan saja," kata Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di kantornya, Rabu (14/9).

Made mengatakan, salah satu alternatif yang kemungkinan diambil supaya Trans Jogja tetap berjalan

namun tidak menambah beban APBD dan masyarakat yakni dengan melakukan efektivitas. Caranya dengan mengidentifikasi jalur-jalur sepi penumpang. Karena beberapa jalur angkutan perkotaan masih ada yang sepi penumpang. Untuk itu pada jam-jam tertentu, pihaknya akan mengurangi armada pada jalur sepi.

"Meski begitu, kami tidak akan mengurangi jalur yang sepi notabene yang jaraknya jauh. Karena jika dikurangi nanti penumpang akan lama menunggu," ujar Made.

Dijelaskan, dari total 17 jalur Trans Jogja yang ada, tidak semuanya dalam kondisi ramai. Untuk itu pihaknya bersama operator Trans Jogja, akan mengkaji dan melakukan penyesuaian. Terutama berkait jalur mana saja yang berpotensi bisa dikurangi jam operasionalnya. Misalnya untuk jalur-jalur yang pada jam-jam 10.00-11.00 WIB sepi ada di mana saja.

"Soal bagaimana teknis pengurangan jam layanan tersebut masih dihitung bersama PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku operator. Hingga saat ini tarif Trans Jogja masih berlaku seperti sebelumnya," tandasnya.

Made berharap dengan naiknya harga BBM masyarakat DIY mau beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum. Selain untuk mengurangi biaya juga untuk mengatasi kemacetan khususnya di perkotaan. Selain itu

dengan masyarakat menggunakan transportasi publik dimana Pemerintah hadir dan mensubsidi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk bermobilisasi.

"Ya semoga dengan kondisi ini masyarakat sadar lebih irit kalau naik angkutan umum," ujarnya.

Made menambahkan, guna mengurangi pencemaran lingkungan dan mengkampanyekan penggunaan angkutan umum untuk pergi ke kantor, sejak awal Agustus 2022 Dinas Perhubungan DIY menandatangani Gerakan 'Green Friday'. Seluruh pegawai Dishub DIY dilarang menggunakan kendaraan pribadi setiap Jumat.

"Pegawai bisa menggunakan sepeda atau angkutan umum untuk pergi ke kantor. Karena kalau cuma menyetor uang parkir ke kantor, itu juga harus diperhatikan," ungkapnya.

Arif menjelaskan, konsep penyediaan transportasi di Indonesia, lebih khusus di DIY sejak tahun akhir 2000-an sudah bertransformasi dari pengelolaan risiko pada operator kepada risiko yang dikelola Pemerintah. Dalam pelaksanaan di lapangan bisa lihat dengan hilangnya sistem (setoran) menjadi BTS atau buy the service, ditandai dengan Trans Jogja yang telah melayani sampai pelosok lebih luas.

"Tarif adalah bagian dari pengelolaan risiko Pemerintah, sehingga beban dan risiko semestinya tidak pada operator maupun pengguna. Jadi keputusan Trans Jogja untuk tidak menaikkan tarif sudah tepat," ujarnya. (Riyana Ekawati/Fira Nurfitriani)

WISATA

Senja Hening di Rawa Pening



KR-M Nur Hasan

Deretan perahu yang disewakan untuk wisatawan di Rawa Pening.



KR-M Nur Hasan

Rawa Pening di sore hari.

WAKTU beranjak sore. Tiba-tiba gerimis turun membasahi kawasan Rawa Pening, yang sore itu tidak terlalu banyak wisatawan berekreasi di salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut. Namun, suasana yang tidak terlalu padat pengunjung itu justru menjadikan suasana sekitar Rawa Pening cukup nyaman bagi wisatawan untuk menghabiskan waktunya menikmati udara segar hingga senja menjelang.

Sekelompok anak muda laki-laki dan perempuan, memanfaatkan keheningan Rawa Pening sore itu, dengan berolahraga ringan, lari-lari alias jogging menyusuri perbukitan yang dikenal dengan sebutan Bukit Cinta Rawa Pening.

Banyak pepohonan besar dan langka tumbuh di perbukitan yang telah dilengkapi sejumlah fasilitas tempat duduk, gazebo, maupun jalan setapak cor semen. Rimbunnya pepohonan membuat suasana tambah sejuk sekaligus hening, ditambah kondisi baru saja diguyur gerimis ringan. "Cocok untuk jogging menunggu senja,

sambil melihat sunset," ucap Novi, wisatawan asal Yogya yang datang ke Rawa Pening bersama teman-temannya, selain berwisata juga sudah menyiapkan kostum untuk olahraga ringan jogging.

Rawa Pening memang menarik untuk dieksplor lebih dalam. Rawa yang erat dengan legenda 'Baru Klinthing' ini merupakan danau seluas 2.670 hektare yang terletak di empat kecamatan di Kabupaten Semarang, yakni Kecamatan Banyubiru, Bawen, Ambarawa, dan Kecamatan Tuntang. Lokasi Rawa Pening berada di cekungan antara Gunung Ungaran, Merbabu dan Gunung Telomoyo.

Selain gudangnya beragam jenis ikan tawar seperti nila, mujair, wader, udang, lele, dan sebagainya, Rawa Pening juga banyak ditumbuhi tanaman enceng gondok. Karena itu, saat perabotan rumah seperti mebel berbahan baku enceng gondok booming beberapa tahun silam, Rawa Pening termasuk salah satu sumber utama penghasil enceng



KR-M Nur Hasan

Pepohonan tumbuh rindang menjulang di Bukit Cinta Rawa Pening.

gondok bagi perajin mebel di Jateng-DIY.

Rawa Pening memiliki sejumlah destinasi wisata

yang dikemas tersendiri. Destinasi Wisata Bukit Cinta terletak di Barat Daya Rawa Pening, masuk wilayah Kecamatan Banyubiru. Di kawasan Wisata Bukit Cinta ini telah didirikan sejumlah fasilitas seperti perahu sewa, prasasti Gembok Cinta, gazebo di perbukitan, 'plaza' untuk beraktivitas di pinggir rawa, tempat memancing, dan sebagainya.

Warung-warung di sekitar areal parkir kendaraan menyediakan beragam camilan khas Rawa Pening sebagai buah tangan, semuanya berbahan baku ikan air tawar dengan harga terjangkau, seperti wader, mujair, udang goreng, rambak kulit ikan, dan lain-lain.

Selain Wisata Bukit Cinta, wisatawan dapat mengunjungi Kampung Rawa, tak jauh dari lokasi ini. Di Kampung Rawa ini terdapat juga rumah makan apung, wahana bermain, perahu karet, bebek air, dan sebagainya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagaimana dikutip Humas Pemprov Jateng mengakui, danau alam seluas 2.670 hektare ini memiliki

pemandangan alam yang eksotis, potensi sumber daya air melimpah, serta seni dan budaya khas. Bahkan daya tarik wisata yang dimiliki Rawa Pening memiliki latar belakang sejarah yang unik, sehingga layak dikembangkan sebagai wisata kelas dunia.

"Landscape pariwisata Rawa Pening belum tertata dan dunia sudah mengakui kondisi itu, atau tepatnya mengakui keprihatinan, karena sebenarnya bisa memberikan banyak manfaat. Saya sedang mencari-cari siapa kira-kira yang mampu mengatasi persoalan Rawa Pening secara tuntas," ujar Ganjar Pranowo dalam suatu acara diskusi membahas potensi wisata Rawa Pening.

Menurut Ganjar, sebagai objek tujuan wisata nasional dan internasional, infrastruktur kawasan Rawa Pening perlu dibangun, termasuk atraksi dan dukungan akses dan transportasi menuju lokasi wisata yang menawarkan panorama alam perbukitan dan suasana asri.

(M Nur Hasan)